



Dewan Desak Pemkot Tertibkan Pondokan dan Indekos

YOGYA, TRIBUN - DPRD Kota Yogyakarta mendesak Pemkot setempat untuk segera menindak tegas pengalihfungsian pondokan maupun indekos yang terintegrasi ke dalam hotel virtual. Selain dianggap menyalahi aturan, alih fungsi operasional tersebut juga dikatakan tidak memberi sumbangsih ke sektor pajak.

Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro mengatakan, sejumlah pemilik hotel mengaku resah dengan keberadaan pondokan maupun indekos yang terintegrasi dengan hotel virtual itu. Padahal secara izin mereka legal dan punya kewajiban serta sumbangsih kepada pemerintah.

Pihaknya mengaku perlu koordinasi dan juga regulasi yang tepat sehingga kehadiran pondokan

maupun indekos yang terintegrasi dengan hotel virtual itu bisa diatur lewat payung hukum dan memberikan sumbangsih kepada pendapatan asli daerah (PAD).

Memang selama ini regulasinya belum ada karena memang manajemennya ada di pusat. Makanya kita harapkan Pemkot bisa bertindak tegas dengan keberadaan itu.

beradaaan angkutan daring beberapa waktu lalu. Payung hukum belum ada, namun operasional sudah berjalan.

Dengan demikian pihaknya juga menunggu inisiatif Pemkot serta koordinasi dengan pusat guna memberikan aturan serta payung hukum yang jelas terkait keberadaan hotel virtual.

"Regulasinya memang dari pusat karena kita sudah diskusi dengan bkpm pusat juga beberapa waktu lalu, tapi kita dorong Pemkot juga punya ketegasan terkait hal ini. Kalau tidak punya sumbangsih pada Pemkot mohon bisa segera ditindaklanjuti," ungkap dia.

Pengawasan

Kepala Sat Pol PP Kota Yogya, Agus Winarto mengklaim, pihaknya akan berupaya untuk mengintensifkan pengawasan terhadap pondokan maupun indekos yang beralih fungsi menjadi hotel.

Agus menyebut, sesuai aturan yang berlaku yakni Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan di dalamnya memuat perihal bahwa operasional pondokan mesti sesuai dengan ketentuan dan tidak untuk dialihfungsikan.

"Penyewaan kamar kan tidak bisa secara harian beda dengan hotel," kata Agus. (jsf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 22 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005